

signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di Kalimantan, selanjutnya perempuan yang mengurus rumah tangga memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan. Secara simultan upah minimum provinsi, rata-rata lama sekolah perempuan, dan perempuan yang mengurus rumah tangga berpengaruh signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan.

Kata Kunci : *AHH perempuan, pendidikan, rumah tangga*

1. PENDAHULUAN

Kesetaraan gender merupakan salah satu program SDGs yang bertujuan untuk mengakhiri diskriminasi yang terjadi pada perempuan dan anak perempuan untuk membantu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Meskipun sudah banyak perempuan yang bersekolah dan memasuki pasar kerja, ketidaksetaraan gender masih tetap terjadi (United Nations Development Programme, 2021). Hal ini dilakukan agar tidak terjadinya kekerasan dan diskriminasi yang terjadi pada perempuan serta memiliki kesempatan yang sama di segala aspek kehidupan (Muhartono, 2020).

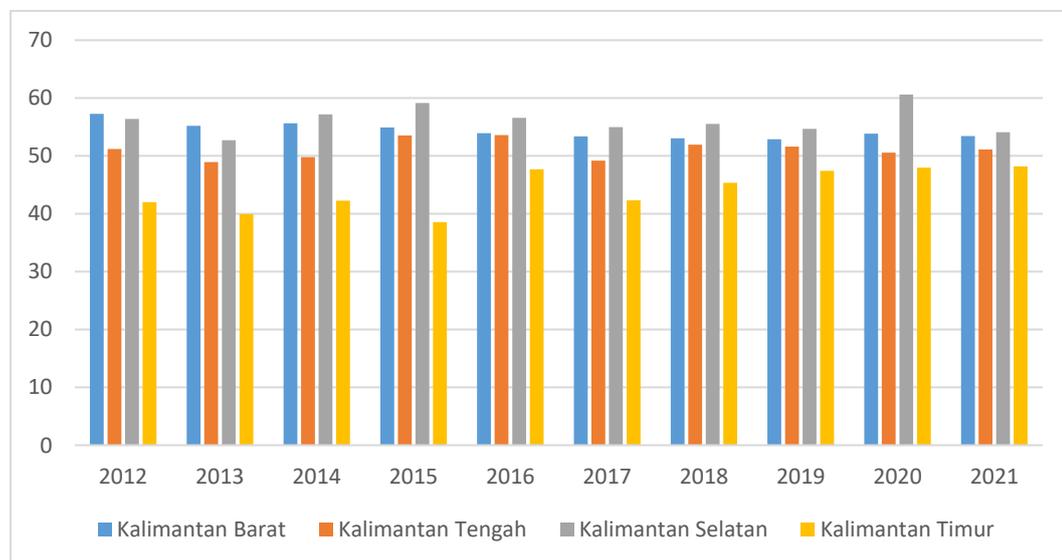
Rendahnya peran perempuan dalam pembangunan menjadi dasar masalah dari pemberdayaan perempuan selama ini, dikarenakan adanya diskriminasi serta rendahnya kualitas hidup perempuan seperti pendidikan, sosial ekonomi, lingkungan, politik, serta kesehatan (Zainal et al., 2017). Fungsi kesetaraan gender dalam pembangunan baik nasional maupun internasional yaitu dapat menghilangkan isu-isu ketimpangan gender seperti, peran perempuan yang sebagian besar menjadi ibu rumah tangga, tenaga kerja yang masih didominasi kaum laki-laki, serta upah yang rendah yang didapatkan kaum perempuan daripada laki-laki (Karwati, 2020). Pada dasarnya kesetaraan gender memiliki hak dan kewajiban yang setara serta memiliki kebebasan untuk mengembangkan kemampuan diri dan keputusan tanpa dihalangi oleh stereotip. Meski begitu kesenjangan gender tetap terjadi diseluruh aspek kehidupan, salah satunya dalam ketenagakerjaan. Masih terdapat stereotip masyarakat yang mengatakan laki-laki menjadi tulang punggung keluarga dan pencari nafkah. Kaum perempuan lebih cenderung dikategorikan sebagai bukan angkatan kerja dikarenakan tugasnya menjadi ibu rumah tangga yang merawat anak, orang sakit maupun orang tua serta mengurus keperluan rumah tangga, hal ini dapat menyebabkan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan cenderung lebih rendah daripada tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki (Badan Pusat Statistik, 2019). Sehingga dapat dikatakan bahwa ketidaksetaraan gender masih terjadi di dalam ketenagakerjaan di Kalimantan.

Dalam hal pekerjaan, perempuan seringkali dihadapkan dalam 2 pilihan, yaitu keluarga dan karir, stereotip yang mengatakan perempuan lebih baik menjadi ibu rumah tangga daripada menjadi wanita karir dapat menghilangkan motivasi perempuan itu sendiri untuk bekerja atau menggapai cita-cita mereka (Prastiwi & Rahmadanik, 2020). Walaupun saat ini kesetaraan gender masih digencarkan, namun tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan terbilang rendah daripada tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki serta adanya gap upah yang diterima perempuan dan laki-laki. Sektor informal yang memperkerjakan perempuan seringkali memberikan upah rendah (Elbrogh-Woytek et al.,

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kalimantan

2013). Perempuan dimasa kini memiliki peran lain selain memilih untuk menjadi ibu rumah tangga yaitu ikut berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja. Hal ini dikarenakan adanya keberhasilan dalam emansipasi wanita. Seringkali perempuan memilih untuk bekerja dikarenakan adanya tuntutan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi keluarganya dan terkadang perempuan ingin diakui keberadaannya di lingkungan masyarakat (Ramadhani, 2016).

Secara global kaum perempuan lebih miskin dibanding kaum laki-laki, dikarenakan terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi seperti akses kesehatan, pendidikan, dan berbagai bentuk kebebasan yang masih terbilang rendah. Akses bagi perempuan dalam mendapatkan pekerjaan layak, pendidikan, bantuan sosial dan berupa program pembukaan lapangan kerja yang dilaksanakan pemerintah masih terbatas. Adapun berdampak pada rendahnya dan tidak stabilnya perolehan sumber keuangan perempuan daripada kaum laki-laki (Todaro & Smith, 2011). Hal serupa juga dijelaskan oleh Saptari & Holzner (1997) yang menyebabkan kemiskinan terjadi pada kaum perempuan yaitu kurang terwakilkannya perempuan dalam pasar tenaga kerja dan juga terdapat pendapat mengenai ekonomi perempuan yang rendah. Pertama, perempuan dengan ekonomi yang rendah memiliki peluang untuk bekerja serta penghasilan mereka dapat membantu mereka keluar dari kemiskinan. Kedua, perempuan dengan ekonomi yang rendah disebabkan oleh pendidikan dan manajemen waktu yang rendah serta kegiatan produktif yang tidak efisien. Selain itu, perempuan yang sudah menikah dianggap ibu rumah tangga yang kurang produktif, penyebabnya yaitu ibu rumah tangga dianggap memiliki banyak waktu luang yang seharusnya dapat digunakan dengan lebih efisien. Perempuan dapat dianggap produktif jika pekerjaan perempuan tersebut menghasilkan uang.



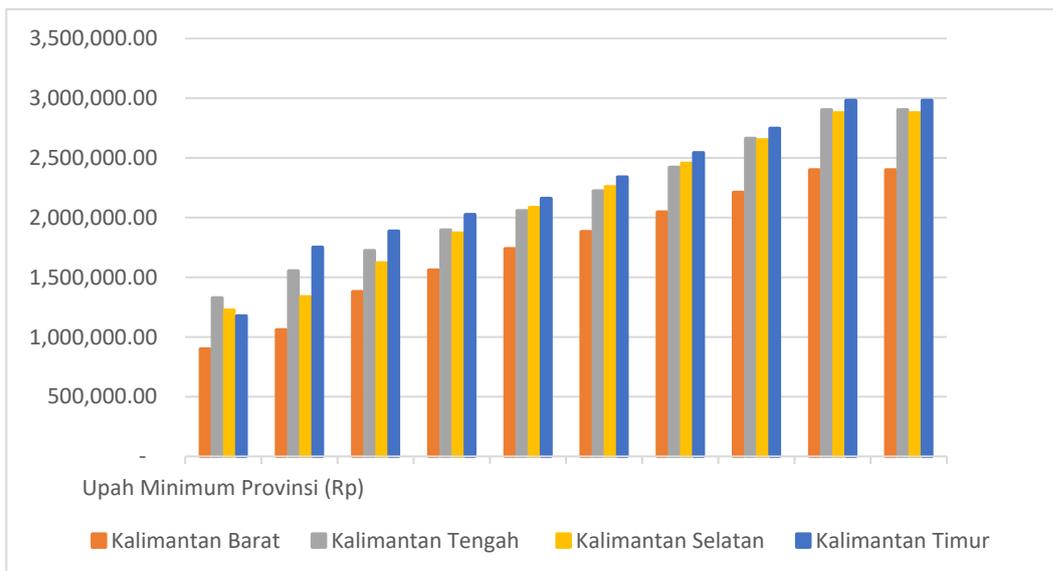
Sumber: Badan Pusat Statistik (2021)

Gambar 1.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kalimantan Tahun 2012-2021

Semakin meningkatnya keikutsertaan perempuan dalam kegiatan perekonomian dapat diketahui dari terlibatnya perempuan dalam dunia kerja di luar kegiatan rumah tangga, dilihat adanya peningkatan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan. Selain itu

banyaknya perempuan yang memasuki bidang pekerjaan, yang mana sebelumnya bidang pekerjaan tersebut didominasi oleh kaum laki-laki (Hardiani dkk, 2020). Keadaan pekerja perempuan di Kalimantan sebagian besar bekerja di sektor informal serta pekerja perempuan tersebut tidak mengikuti pelatihan kerja dan memiliki tingkat pendidikan yang rendah yaitu SMP kebawah, maka dari itu perempuan di Kalimantan cenderung untuk bekerja di sektor informal (Munawaroh, 2022).

Berdasarkan gambar 1.1 tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan setiap provinsi di Kalimantan setiap tahunnya mengalami fluktuatif. Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan tertinggi berada di provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020 sebesar 60,61%. Sedangkan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan terendah berada di provinsi Kalimantan Timur tahun 2015 sebesar 38,56%. Tinggi rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan dipengaruhi beberapa faktor, yaitu tingkat pendidikan, upah, serta umur (Sumarsono, 2009) Adanya peningkatan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan disebabkan karena pendidikan perempuan setiap tahun meningkat serta semakin tinggi kesempatan dalam bekerja yang tersedia bagi perempuan (N. M. Putri & Purwanti, 2012). Menurut (Purwanti & Rohayati, 2014) dampak dari adanya perempuan yang berpartisipasi dalam pasar kerja, yaitu perempuan dapat memberikan kontribusi pendapatan yang besar pada perekonomian dan kesejahteraan bagi rumah tangga ataupun masyarakat.



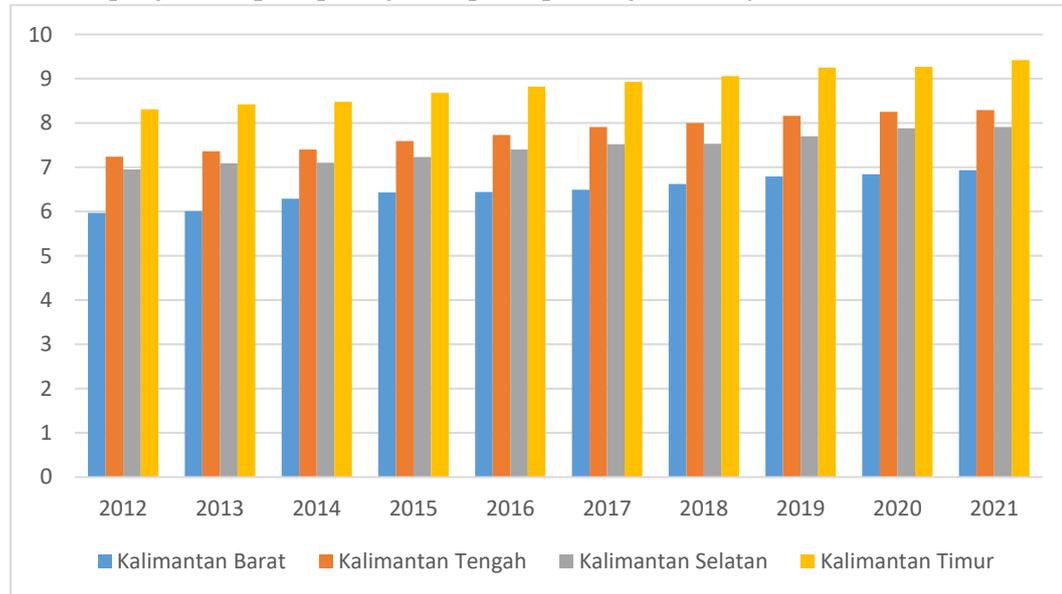
Sumber: Badan Pusat Statistik (2022)

Gambar 1.2 Upah Minimum Provinsi di Kalimantan Tahun 2012-2021

Berdasarkan gambar 1.2 upah minimum provinsi di keempat provinsi di Kalimantan dalam kurun waktu 10 tahun mengalami peningkatan setiap tahunnya. Upah minimum provinsi tertinggi terjadi tahun 2020 di Provinsi Kalimantan Timur, yaitu sebesar Rp 2.981.397. Namun pada tahun 2021 upah minimum provinsi di keempat provinsi di Kalimantan tidak mengalami perubahan dari tahun 2020, hal ini disebabkan covid-19 sehingga pemerintah memutuskan tidak menaikkan upah minimum provinsi pada tahun 2021. Sedangkan upah minimum provinsi terendah yaitu tahun 2012 di Kalimantan Barat, yaitu sebesar Rp 900.000. besarnya upah yang diterima tergantung kepada produktivitas

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kalimantan

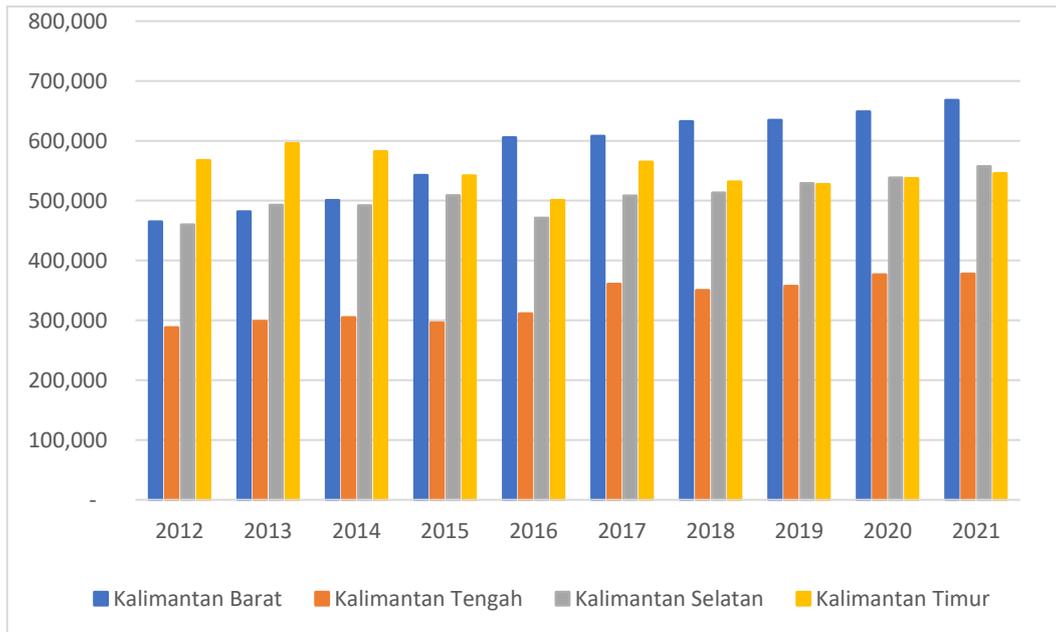
para tenaga kerja (Bonneri dkk, 2018) adapun pendidikan dapat mempengaruhi besarnya upah yang akan diterima, semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin tinggi penawaran upahnya (Badan Pusat Statistik, 2019). Selain itu upah juga sangat mempengaruhi masyarakat untuk turut serta dalam pasar tenaga kerja, Peningkatan upah akan berpengaruh kepada peningkatan partisipasi angkatan kerja (Sarsi dkk, 2014).



Sumber: Badan Pusat Statistik (2022)

Gambar 1.3 Rata-Rata Lama Sekolah Perempuan di Kalimantan Tahun 2012-2021

Dari gambar 1.3 dapat dilihat rata-rata lama sekolah perempuan keempat provinsi di Kalimantan setiap tahunnya menunjukkan peningkatan. Rata-rata lama sekolah perempuan tertinggi yaitu pada tahun 2021 di provinsi Kalimantan Timur sebesar 9,42 tahun artinya pada tahun 2021 pendidikan perempuan di provinsi Kalimantan Utara sama dengan dengan kelas 3 SMP. Sedangkan rata-rata lama sekolah perempuan terendah terjadi pada tahun 2012 di provinsi Kalimantan Barat, yaitu sebesar 5,97 tahun artinya pada tahun 2012 pendidikan perempuan di provinsi Kalimantan Barat setara kelas 5 SD. Rendahnya tingkat pendidikan seseorang dapat berakibat kepada besarnya upah yang diterima serta menyebabkan banyaknya tenaga kerja yang tidak dapat masuk kedalam pasar kerja yang dituntut memiliki keahlian yang tinggi (Yuniati & Mataram, 2019).



Sumber: Badan Pusat Statistik (2022)

Gambar 1.4 Jumlah Perempuan yang Mengurus Rumah Tangga di Kalimantan Tahun 2012-2021

Jumlah perempuan yang memilih sebagai ibu rumah tangga di keempat provinsi di Kalimantan mengalami fluktuatif. Dapat dilihat grafik perempuan yang berperan sebagai pengurus rumah tangga bergerak sesuai grafik tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan, dimana jika perempuan yang berperan memilih menjadi ibu rumah tangga mengalami penurunan maka tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan mengalami peningkatan dan sebaliknya. Provinsi Kalimantan Barat merupakan yang tertinggi perempuan sebagai pengurus rumah tangga jumlah perempuan yang mengurus rumah tangga. Provinsi Kalimantan Tengah memiliki jumlah dengan perempuan sebagai pengurus rumah tangga terendah. Banyaknya perempuan yang menambil peran sebagai ibu rumah tangga menyebabkan tingkat partisipasi angkatan kerja menurun. Keputusan perempuan yang sudah memiliki pekerjaan dan mengambil peran sebagai pengurus rumah tangga merupakan keputusan yang tidak mudah. Ada banyak hal lain yang dipertimbangkan dari sisi ekonomi, ego ataupun cita-cita (Badan Pusat Statistik, 2018).

Berdasarkan data diatas, adanya ketidaksesuaian antara upah minimum provinsi dengan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan. Data diatas memperlihatkan saat upah minimum provinsi mengalami kenaikan, terjadi penurunan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan tahun 2016 ke tahun 2017. Sejalan dengan analisis Maulana dkk (2022) menyatakan saat upah peningkatan upah minimum, tingkat partisipasi angkatan kerja terjadi penurunan. Hal tersebut dikarenakan terdapat pertumbuhan penduduk usia kerja yang tidak langsung terjun ke pasar tenaga kerja, melainkan mereka lebih mengambil kesempatan untuk bersekolah dibandingkan untuk bekerja.

Tidak sejalan dengan penelitian Weinstein (2017) dan Yuniati & Mataram (2019), Weinstein mengungkapkan bahwa jika terjadi peningkatan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan sebesar 10% maka akan meningkatkan upah sebesar 5% dan jika produktivitas kerja perempuan tinggi maka akan berpengaruh kepada upah yang akan

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kalimantan

diterima serta tenaga kerja perempuan yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, maka perempuan tersebut biasanya akan memperoleh upah yang tinggi pula. Menurut Yuniati & Mataram (2019) tingkat pendidikan yang rendah dapat mempengaruhi perempuan ingin bekerja di semua sektor pekerjaan dan sebagian besar bekerja di sektor informal.

2. KAJIAN LITERATUR

2.1. Ketenagakerjaan

Tingkat partisipasi angkatan kerja diartikan oleh BPS merupakan total penduduk yang berusia produktif untuk berpartisipasi dalam pasar kerja, baik yang bekerja maupun dalam proses sedang mencari pekerjaan, serta terlibat dalam menghasilkan barang atau jasa. tingkat partisipasi angkatan kerja diartikan sebagai jumlah angkatan kerja pada persentase kelompok umur tertentu, dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{TPAK} = \frac{\text{Jumlah angkatan kerja}}{\text{jumlah penduduk usia 15thn ke atas}} \times 100\%$$

Penduduk yang bekerja atau dalam proses mencari pekerjaan diketahui melalui tingkat partisipasi angkatan kerja. Jika nilai tingkat partisipasi angkatan kerja memiliki nilai yang rendah maka diartikan penduduk yang berada pada usia kerja yang tidak termasuk ke dalam angkatan kerja merupakan penduduk yang menempuh pendidikan maupun yang memilih sebagai pengurus rumah tangga. Sehingga angka tingkat partisipasi angkatan kerja dominan diakibatkan oleh jumlah penduduk yang sedang menempuh pendidikan serta ibu rumah tangga (Setyowati, 2009).

Menurut Manning (1980) dalam Kuncoro mengidentifikasi setidaknya ada empat segmentasi dalam pasar tenaga kerja, (1) Pada segmen pasar terjadi ketidaksamaan tingkat upah yang tinggi dan berkelanjutan (2) adanya pembagian pekerja diklasifikasikan (khususnya jenis kelamin, pendidikan, maupun pengalaman) disegmen berbeda. (3) Pada segmen pasar dengan upah yang tinggi diikuti oleh produktivitas pekerja yang lebih tinggi.

Tenaga kerja merupakan penduduk yang sudah mampu untuk bekerja tanpa adanya paksaan untuk mengerjakan pekerjaan tersebut, serta penduduk tersebut termasuk dalam usia kerja (Sumarsono, 2009). Tenaga kerja dikelompokkan menjadi dua:

1. Angkatan kerja yang dapat digolongkan bekerja, yaitu:
 - a. Pekerja yang dalam seminggu bekerja dan memiliki tujuan untuk mendapatkan pendapatan serta minimal bekerja selama 2 hari.
 - b. Pekerja yang dalam seminggu tidak bekerja, namun pekerjaan mereka merupakan pekerjaan yang memerlukan kemampuan khusus, seperti tukang cukur, dokter, dan lain-lainnya serta mereka yang memiliki pekerjaan tetap, seperti pegawai pemerintah atau swasta namun mereka tidak dapat masuk kerja karena kesehatan, mengambil cuti, atau melakukan mogok kerja. Kelompok ini setidaknya bekerja kurang dari 2 hari.
2. Bukan angkatan kerja. Golongan ini dapat dikatakan bagian dari tenaga kerja namun mereka secara langsung tidak ikut serta pada kegiatan produktif seperti barang dan